

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH DIMEDIASI OLEH PENGAWASAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA

Orpaniati Rantepulung¹
Westim Ratang²
J. A. Mollet³

Abstract

The purpose of this research is to know and analyze the effect accountability and transparency to local government performance is mediated by financial supervision. The method used in this research is path analysis. The results of the analysis show that: (1) Financial accountability influences regional financial management supervision. (2) Financial transparency affects regional financial management supervision. (3) Financial accountability influences local government performance. (4) Financial transparency affects local government performance. (5) Financial accountability, financial transparency and financial supervision affect the performance of local governments. (6) Financial accountability affects the performance of regional governments through supervision of regional financial management. (7) Financial transparency influences regional government performance through supervision of regional financial management. (8) Supervision of regional financial management affects the performance of regional governments. (9) Accountability has a dominant influence on the performance of the regional government of Papua Province.

Keywords: *Accountability, Transparency, Local Government Performance, Financial Supervision*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah yang dimediasi oleh pengawasan keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah. (2) Transparansi keuangan mempengaruhi pengawasan pengelolaan keuangan daerah. (3) Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. (4) Transparansi keuangan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. (5) Akuntabilitas keuangan, transparansi keuangan, dan pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. (6) Akuntabilitas keuangan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah melalui pengawasan pengelolaan keuangan daerah. (7) Transparansi keuangan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah melalui pengawasan pengelolaan keuangan daerah. (8) Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. (9) Akuntabilitas berpengaruh dominan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Papua.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan*

PENDAHULUAN

Kinerja pemerintah dinilai baik apabila dapat dilihat dari pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Jika kinerja yang telah dilaksanakan dan mencapai

¹ Magister Keuangan Daerah, Universitas Cenderawasih

² Magister Keuangan Daerah, Universitas Cenderawasih

³ Magister Keuangan Daerah, Universitas Cenderawasih

hasil yang memuaskan itu harus sesuai dengan visi dan misi suatu kelompok atau organisasi yang sudah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan. Pengukuran kinerja membantu para pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkat pencapaian tujuan dan membantu para warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sejajar atau sama dengan uang yang dikeluarkan untuk pelayanan program tersebut (Ihyaul, 2017). Maka dari itu kinerja lembaga pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan metode akuntabilitas diperlukan manajemen kinerja yang baik.

Dalam penerapan berbagai macam aturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penerapan konsep akuntabilitas keuangan dan transparansi keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan bisa mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada masyarakat. Pada pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan transparansi keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Wiguna, 2015). Istilah kinerja seringkali digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi lebih baik dan berkualitas juga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Sebagai organisasi sektor publik, masyarakat menuntut pemerintah daerah agar memiliki kinerja yang baik terhadap kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa menanggapi dengan lingkungan dan berupaya memberikan pelayanan yang baik, transparansi keuangan serta berkualitas dan juga harus adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah daerah tersebut (Adi, 2015).

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Grand Theory (Teori Harapan)

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari agency theory yaitu Stewardship theory yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Stewardship theory dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals. Akuntansi sebagai penggerak berjalannya transaksi bergerak ke arah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik (Wilson, 2012).

Kondisi semakin kompleks dengan bertambahnya tuntutan akan akuntabilitas pada organisasi sektor publik, principal semakin sulit untuk melaksanakan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi pengelolaan menjadi semakin nyata. Berbagai keterbatasan, pemilik sumber daya (capital suppliers/principals) mempercayakan (trust = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (steward = manajemen) yang lebih siap.

Kontrak hubungan antara steward dan principals atas dasar kepercayaan bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model yang sesuai pada kasus organisasi sektor publik adalah stewardship theory. Implikasi teori stewardship terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi pemerintah di Inpektorat daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan

masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut maka stewards (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas (Dian Indira, 2017).

Akuntabilitas

Dalam konteks pemerintahan akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance atau pengelolaan pemerintah yang baik, dimana pemikiran tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju pemerintah yang bersih. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah terkait laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Halim, 2016).

Akuntabilitas merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk melaporkan segala kegiatan yang telah dilakukan. Yang dimaksudkan penelitian ini tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah pertanggungjawaban dalam bentuk pembuatan laporan keuangan yang ada di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada dimensi variabel ini adalah mekanisme dan aturan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari mekanisme proses penganggaran, mekanisme dalam konsep dan indikator kinerja anggaran, dan standar biaya. Mekanisme pertanggungjawaban pelaporan dan evaluasi, mekanisme pengendalian, mekanisme pengawasan dan pemeriksaan (Wiguna, 2015).

Menurut Penny Kusumastuti (2014), akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Menurut Adisasmita (2012), mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sedangkan menurut Djalil (2014), mengemukakan bahwa definisi akuntabilitas adalah: “Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dari tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap hasil kinerjanya.

Akuntabilitas yang harus dilakukan organisasi pemerintahan terdiri atas beberapa indikator. Menurut Rasul (2012), terdapat 5 indikator, diantaranya:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Pada akuntabilitas hukum berhubungan dengan kepatuhan pemerintah terhadap hukum yang berlaku pada perundang-undangan maupun peraturan dalam organisasi. Dengan adanya dimensi akuntabilitas hukum ini dapat terciptanya supremasi hukum didalam lingkup pemerintah. Sedangkan akuntabilitas kejujuran dikaitkan dengan penghindaran penyelewengan jabatan maupun dana publik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya akuntabilitas kejujuran terciptanya praktik lembaga publik yang sehat.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial dengan kata lain akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya yang dilaksanakan secara efektif dan seefisien mungkin.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa program yang direncanakan dan akan dilaksanakan nantinya sesuai kebutuhan yang ada,

dengan berprinsip pada program yang bermutu serta dapat mencerminkan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga publik mengeluarkan serta menetapkan kebijakan harus didasari pada bagaimana dampak yang akan ditimbulkan kedepannya, tujuan dilakukannya kebijakan tersebut, serta mengapa kebijakan tersebut dilakukan.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik dalam mengelola sampai menggunakan dana publik seefisien dan seefektif mungkin. Pemerintah mempunyai kewajiban atas laporan yang dibuat berdasarkan gambaran kinerja finansial.

Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Coryanata, 2015). Krina (2012), menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Prinsip transparansi memiliki dua aspek, yaitu: (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah sesuatu mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 58 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan

dan kepatuhan. Menurut Agoes dan Ardana (2009), transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Menurut Mardiasmo (2013), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Krina (2013), indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan didaerah mereka sendiri.

Pengawasan

Pengawasan adalah hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan karena dengan adanya pengawasan yang baik maka suatu pekerjaan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal dan tepat. Secara keseluruhan dapat kita ketahui dalam suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat mencegah

dan memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan dapat membantu melaksanakan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien (Halim, 2016).

Menurut Baldrick (2017), pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan yang dibuat dan dilaksanakan. Dengan adanya pengawasan yang baik maka akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Maka dari itu pemerintah daerah harus mengadakan pengawasan keuangan daerah sehingga bisa mengontrolkan keuangan yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan. Sehingga pada dasarnya tindakan pengawasan ini sangat aktif karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang luar dugaan.

Menurut penelitian Pujiono & Puspitasari (2016), dengan judul pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah, dapat disimpulkan bahwa pengawasan intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah. Dalam penelitian mengatakan bahwa dengan adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah ini yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Inspektorat Daerah untuk bisa atau mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengurangi penyimpangan yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Hal ini disebabkan karena pencapaian suatu visi dan misi ini dibutuhkan yang namanya pengawasan berdasarkan uraiannya, pengawasan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Semakin baik tingkat pengawasan pengelolaan keuangan daerah maka, akan menghasilkan kinerja pemerintah juga akan baik. Maka dapat disimpulkan dari beberapa penelitian tentang pengawasan keuangan daerah adalah kemampuan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, apakah

pengawasan keuangan daerah sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan atau belum.

Pemerintah membentuk adanya pengawasan keuangan daerah ini dengan tujuan untuk mengontrol keuangan yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan yang diadakan. Maka pengawasan ini harus aktif untuk mencari tindakan perbaikan jika terjadi hal-hal di luar dugaan. Menurut Handoko (2014), yang meliputi dimensi dan indikator pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Prosedur terkait pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2. Standar adanya batasan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan daerah.
3. Ketelitian adanya pengukuran kerja pemerintah daerah.
4. Pengukuran pekerjaan adanya evaluasi kinerja pemerintah daerah.
5. Perbaikan adanya koreksi kinerja dari pemerintah daerah.

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang artinya prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang atau kelompok. Dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (pasal 1 ayat 5) Kinerja penyelenggaraan pemerintah adalah hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah sesuai dengan tanggungjawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan.

Kinerja adalah gambaran akan tingkat sebuah pencapaian dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang dijalankan sesuai dengan standar tertentu dan bertanggungjawab penuh untuk memberikan laporan kepada pemberi kerja. Keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi dalam menjalankan semua aktifitasnya harus dicatat dan diukur. Pernyataan ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik maupun penggunaan anggaran belanja daerah seringkali menjadi dasar topik utama yang diperbincangkan oleh publik.

Dalam krisis ekonomi yang terjadi dapat disebabkan karena tata kelola yang buruk pada sebagian besar pelaku ekonomi. Maka dari itu pemerintah daerah dituntut agar bisa meningkatkan kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap dengan lingkungannya. Salah satu cara untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat dalam hal kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah dengan memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas, serta pelayanan yang efektif dan efisien, dan juga pembagian tugas yang lebih baik lagi pada pemerintah tersebut seperti pembagian sistem pengendalian yang dapat diandalkan dan bertanggungjawab pada publiknya (Pujiono, dkk, 2016).

Menurut Edison (2016), Kinerja merupakan hasil dari suatu proses yang menunjukkan dan diukur selama periode tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka yang dimaksudkan dengan Kinerja Pemerintah Daerah adalah pegawai yang mampu melibatkan diri dalam pengelolaan keuangan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan daerah sudah ditetapkan. Pada variabel ini pencapaian target dalam suatu kegiatan terhadap kehidupan masyarakat tingkat pencapaian program dan moral perilaku pegawai.

Menurut Wiguna (2015), dimensi dari variabel ini adalah: 1) Kesesuaian dengan standar pengelolaan keuangan 2) Pencapaian efisien operasional 3) Pencapaian target kinerja dari suatu program 4) Ketepatan dan kesesuaian hasil 5) Tingkat pencapaian program 6) Dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat serta 7) Moral perilaku pegawai, instrumen dan pengukuran.

Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program berhasil atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja untuk membantu kinerja sebagai alat ukur. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan suatu tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan yang diberikan oleh para pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan tersebut (Edison, 2016).

Menurut Mahsun (2014), karakteristik kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

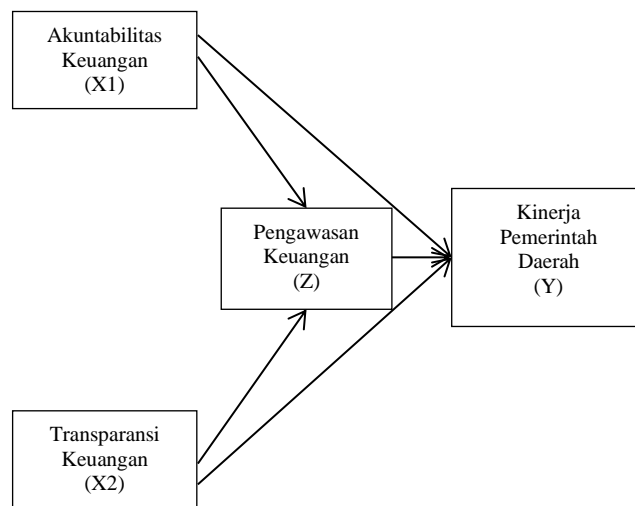
1. Indikator masukan (Input), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator proses (Process), dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi.
3. Indikator keluaran (Output), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya: a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan. b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
4. Indikator hasil (Outcome), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/ instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
5. Indikator manfaat (Benefit), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil.
6. Indikator dampak (Impact), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

Pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota dalam menjalankan kewenangannya berjalan diatas kebijakan, standar, norma, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga arah pembangunan tetap terjaga pada satu tujuan yaitu tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, untuk menjalankan roda pembangunan di daerah tersebut maka

dibentuklah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengacu kepada tiga fungsi pemerintahan daerah yaitu melakukan tugas pemerintahan.

Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Pemerintahan dan harus memiliki ukuran standar pengelolaan serta standar ketercapaian sasaran target pembangunan dan inilah yang lazim disebut dengan istilah *good governance*. Sehingga penting untuk meneliti persoalan ini, mengingat banyak pengelolaan keuangan daerah baik itu provinsi/kota/kabupaten juga masih kurang transparansi, akuntabilitas dan sulit diawasi dari kacamata masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran
Sumber, Kerangka Pikir Penulis, 2022

METODE PENELITIAN

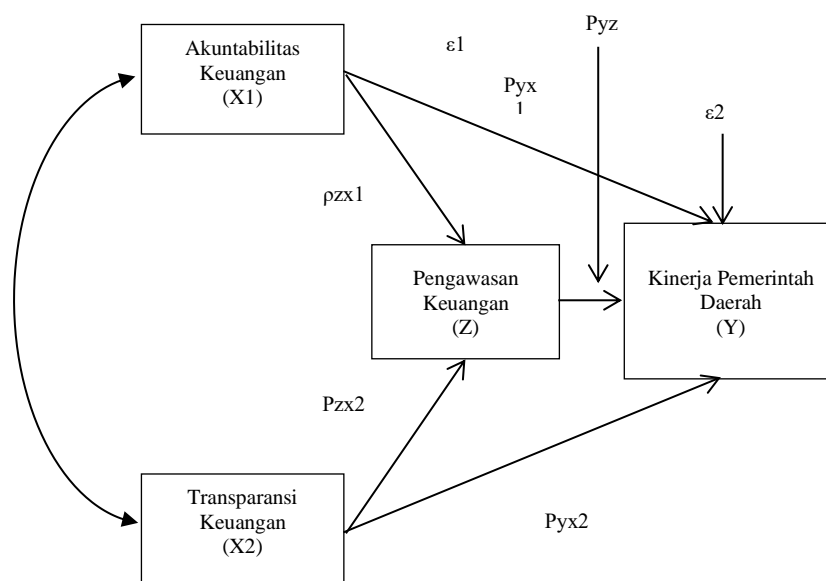
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dalam uji statistik. Data kuantitatif adalah pengujian data dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka untuk menjawab rumusan masalah, serta perhitungan untuk hipotesis yang telah diajukan apakah variabel bebas (akuntabilitas keuangan dan transparansi keuangan)

berpengaruh terhadap variabel terikat (kinerja pemerintah daerah) melalui variabel mediasi (pengawasan keuangan).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis). Penulis menggunakan analisis jalur (path analysis) karena untuk mengetahui hubungan sebab akibat, dengan tujuan menerangkan pengaruh langsung atau tidak langsung antar variabel eksogen dengan variabel endogen.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis dan memastikan apakah ada pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah serta dampaknya pada kinerja Pemerintah Daerah. Menurut Sugiyono (2016), analisis jalur adalah bagian dari model regresi yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar satu variabel dengan variabel lainnya. Analisis jalur digunakan dengan menggunakan korelasi, regresi dan jalur sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel intervening.

1. Path Diagram (Diagram Jalur) Diagram jalur adalah alat untuk melukiskan secara grafis, struktur hubungan kausalitas antar variabel independen, intervening dan dependen. Model diagram jalur dibuat berdasarkan variabel yang diteliti, dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah akuntabilitas (X1), transparansi (X2), pengawasan (Z) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y).



Gambar 2.
Diagram Jalur (Path Diagram)

Keterangan:

X_1	:	Akuntabilitas
X_2	:	Transparansi
Y	:	Kinerja Pemerintah Daerah
Z	:	Pengawasan
ρ (rho)	:	Koefisien masing-masing variable
ρ_{ZX_1}	:	Koefisien jalur transparansi terhadap pengawasan
ρ_{ZX_2}	:	Koefisien jalur akuntabilitas terhadap pengawasan
ρ_{ZY}	:	Koefisien jalur pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah
$r_{X_1X_2}$:	Koefisien korelasi antara variabel independen
ε	:	Faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen

Berdasarkan diagram jalur kita dapat melihat bagaimana pengaruh langsung dan tidak langsung tersebut. Pengaruh langsung adalah pengaruh dari satu variabel independen ke variabel dependen tanpa melalui variabel lain yang disebut variabel intervening (Juanim, 2004). Pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dapat dilihat sebagai berikut:

1. Hasil Langsung (Direct Effect) Hasil dari X_1 dan X_2 terhadap Y , Z dan hasil Y terhadap Z atau lebih sederhana dapat dilihat sebagai berikut:

$$\begin{array}{lcl} X_1, X_2 & \rightarrow & Y \quad : \rho_{yx1}, \rho_{yx2} \\ Y & \rightarrow & Z \quad : \rho_{zy1}, \rho_{zy2} \\ Z & \rightarrow & \varepsilon_1 \end{array}$$

2. Hasil Tidak Langsung (Indirect Effect) Hasil tidak langsung (indirect effect) adalah dari X terhadap Z melalui Y , atau lebih sederhana dapat dilihat sebagai berikut:

$$X \rightarrow Y \rightarrow Z: (\rho_{yx}), (\rho_{zy})$$

Penjelasan rumus diatas memperlihatkan bahwa hasil langsung diperoleh dari hasil analisis jalur nilai beta, sedangkan hasil tidak langsung diperoleh dengan mengalikan koefisien rho (nilai beta) yang melewati variabel antara (penghubung) dengan variabel langsungnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengawasan

Pengujian pengaruh variabel akuntabilitas keuangan terhadap variabel pengawasan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua. Akuntabilitas mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bertanggungjawab, dalam hal ini jika tingkat akuntabilitas

tinggi dari pemerintah daerah maka pertanggungjawaban sebagai pengawas dari Inspektorat akan semakin tinggi.

Hasil frekuensi mengenai variabel akuntabilitas yang terdiri dari indikator akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial pada OPD Provinsi Papua tergolong cukup karena rata-rata jawaban responden dari 8 item pertanyaan yang diberikan memiliki rata-rata jawaban sebesar 3,97 berada pada kategori setuju. Artinya bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pemerintah daerah mampu untuk mempertanggung jelaskan, mempertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan atas semua hasil pekerjaan yang ditanggungkan.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bagian isu kebijakan yang strategis di Indonesia saat ini karena kebaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdampak pada upaya terciptanya good governance. Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Santoso & Pambelum, 2018).

Menurut Santoso & Pambelum, (2018), dalam pelaksanaan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip: 1) Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah, perlu melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; dan 5) Harus jujur, objektif, transparan dan aktif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemuktakiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Oktana Yudha Sakti (2015), yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ulfah Juliarti (2019), menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam penerapan akuntabilitas semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka akan semakin baik tingkat pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Provinsi Papua.

Pengaruh Transparansi Keuangan Terhadap Pengawasan Keuangan

Pengujian pengaruh variabel transparansi keuangan terhadap variabel pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua menunjukkan bahwa variabel transparansi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua.

Hasil frekuensi mengenai variabel transparansi dengan indikator penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama pada OPD Provinsi Papua tergolong tinggi karena rata-rata jawaban responden dari 6 item pertanyaan yang diberikan memiliki rata-rata jawaban sebesar 4,13 berada pada kategori setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi dalam menginformasikan hasil kerja yang dilakukan. Dengan meningkatnya transparansi dalam mengelola keuangan desa maka diharapkan kualitas pelayanan publik akan semakin baik dan dapat mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih.

Transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan suatu kegiatan yang berupa informasi, komunikasi bahkan dalam hal penganggaran kepada inspektorat sebagai lembaga pengawasan yang nyata dan jujur sesuai dengan perundang-undangan. Secara langsung pemerintah daerah ingin mendapatkan penilaian dari inspektorat atas kinerjanya. Dengan ini bisa membuat pemerintah berupaya dalam menampilkan kinerja terbaiknya dalam memenuhi tugas dan tanggungjawabnya. Selain dari penilaian inspektorat daerah, penilaian dari pengawas juga akan menjadi tekanan bagi pemerintah daerah untuk bisa berusaha

menghasilkan kinerja yang terbaik sehingga meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.

Menurut penelitian Fifit Purnama (2019), aturan transparansi dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria; (1) adanya pertanggungjawaban terbuka, (2) adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan. (3) adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja (Audyta & Lismawati, 2013).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Oktana Yudha Sakti (2015), menyatakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengawasan. Penelitian lain terkait pengaruh transparansi terhadap pengawasan dilakukan oleh Ulfah Juliarti (2019), menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengawasan. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam penerapan transparansi semakin tinggi tingkat transparansi maka akan semakin baik tingkat pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Provinsi Papua.

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengujian pengaruh variabel akuntabilitas keuangan terhadap variabel kinerja pemerintah daerah menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Secara umum, dalam setiap pengelolaan anggaran selalu dikaitkan dengan akuntabilitas publik. Pada pengelolaan anggaran perlu adanya akuntabilitas, dimana semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik baik di pusat maupun di daerah (Mahmud, 2013). selain itu tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik dalam halnya pengelolaan anggaran.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Dengan adanya penerapan akuntabilitas akan tercipta kinerja pemerintah yang lebih baik. Kinerja pemerintah berkaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fifit Purnama (2019), menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan pada kinerja pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian Yohana Maria Viane Ina Laga (2019), menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengujian pengaruh variabel transparansi keuangan terhadap variabel kinerja pemerintah daerah menunjukkan bahwa variabel transparansi keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2013), transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Fernandes (2015), yang menyatakan bahwa transparansi (keterbukaan) dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan kinerja anggaran yang berkonsep value for money untuk menghasilkan anggaran yang diharapkan. Kebijakan dalam penyusunan

anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran, oleh karena itu semakin transparan kebijakan itu sendiri maka akses informasi dapat dengan mudah diketahui oleh publik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fifit Purnama (2019), menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian lain terkait pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah dilakukan oleh Lasmin Mopangga (2017), menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Transparansi Keuangan dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengujian pengaruh antara akuntabilitas keuangan, transparansi keuangan dan pengawasan keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah Provinsi Papua. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan adanya akuntabilitas, transparansi dan pengawasan yang efektif maka kinerja pemerintah daerah yang dihasilkan akan semakin baik. Penerapan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan akan membuat kinerja pemerintah daerah menjadi semakin bagus, sehingga praktik inefisiensi, penyelewengan dan pemborosan anggaran dapat dihapuskan atau diminimalisir, karena kinerja organisasi dapat dinilai dan diawasi oleh publik. Hasil penelitian dari Rezky Mulya Anugriani (2014), menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan akan membuat kinerja pemerintah daerah menjadi baik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lasmin Mopangga (2017), dan Yohana Maria Viane Ina Laga (2019), menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Pengawasan Keuangan

Pengujian pengaruh tidak langsung variabel akuntabilitas keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah melalui variabel pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah Provinsi Papua. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan pengawasan pengelolaan keuangan maka akuntabilitas akan terlaksana dengan baik.

Salah satu prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Aspek penting yang harus dipertimbangkan yaitu: a) aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dapat dilacak otoritas legalnya, b) aspek pengelolaan keuangan daerah secara baik. Perlindungan asset fisik dan finansial mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertical maupun horizontal dengan baik.

Pengawasan dilakukan guna memberikan koreksi atas apa yang telah dikerjakan oleh seseorang, lembaga atau instansi. Pengawasan keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah di susun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Dengan adanya pengawasan yang didasarkan pada prinsip pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Ulfah Juliarti (2019), menunjukkan bahwa, akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah melalui pengawasan.

Pengaruh Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Pengawasan Keuangan

Pengujian pengaruh tidak langsung variabel transparansi keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah melalui variabel pengawasan pengelolaan keuangan daerah mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah berfungsi sebagai variabel intervening dalam penelitian ini.

Semakin meningkatnya transparansi keuangan maka akan meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dan kinerja pemerintah daerah.

Dalam ranah keuangan publik, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Mardiasmo (2004), mengatakan transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Penelitian yang dilakukan Ulfah Juliarti (2019), menunjukkan bahwa, transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah melalui pengawasan. Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama pengawasan pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sesungguhnya terjadi dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Dalam proses pengawasan, inspektorat perlu mengedepankan asas transparansi sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaannya.

Pengaruh Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengujian pengaruh variabel pengawasan keuangan pengelolaan keuangan daerah terhadap variabel kinerja pemerintah daerah menunjukkan bahwa variabel pengawasan pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Papua.

Hasil frekuensi mengenai variabel pengawasan yang terdiri dari indikator prosedur terkait pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, standar adanya batasan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan daerah, ketelitian adanya pengukuran kerja pemerintah daerah, pengukuran pekerjaan adanya evaluasi kinerja pemerintah daerah dan perbaikan adanya koreksi kinerja dari pemerintah daerah pada OPD Provinsi Papua tergolong tinggi karena rata-rata jawaban responden dari 7 item pertanyaan yang diberikan memiliki rata-rata jawaban sebesar 4,10 berada pada kategori setuju. Artinya bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat pada OPD Provinsi Papua telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan.

Pengawasan adalah hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan karena dengan adanya pengawasan yang baik maka suatu pekerjaan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal dan tepat. Menurut Setyaningrum (2017), pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan yang dibuat dan dilaksanakan. Dengan adanya pengawasan yang baik maka akan mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan menghasilkan yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Maka dari itu pemerintah daerah harus mengadakan yang adanya pengawasan keuangan daerah sehingga bisa mengontrolkan keuangan yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan yang diselenggarakan. Sehingga pada dasarnya tindakan pengawasan ini sangat aktif karena mencari tindakan perbaikan apabila terjadi hal-hal yang diluar dugaan.

Pengawasan keuangan daerah ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah, karena dengan adanya pengawasan kinerja pemerintah bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini didukung oleh penelitian Yohana Maria Viane Ina Laga (2019), menyatakan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kinerja

pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Lasmin Mopangga (2017) serta Yohana Maria Viane Ina Laga (2019) menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Variabel yang Berpengaruh Dominan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Pengujian pengaruh variabel akuntabilitas keuangan, transparansi keuangan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah terhadap variabel kinerja pemerintah daerah menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh dominan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Akuntabilitas merupakan konsep terkait dengan mekanisme pertanggung jawaban dari satu pihak ke pihak yang lain. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang harus diikuti dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ini secara langsung dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

SIMPULAN

Dari analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua. Semakin baik tingkat akuntabilitas keuangan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan berdampak positif bagi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
2. Transparansi keuangan berpengaruh terhadap pengawasan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Papua. Adanya transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka pengawasan pengelolaan keuangan daerah akan semakin efektif.
3. Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Dengan adanya penerapan akuntabilitas keuangan akan tercipta kinerja pemerintah yang lebih baik.

4. Transparansi keuangan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua. Transparansi keuangan (keterbukaan) dalam pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah sesuai dengan yang diharapkan.
5. Akuntabilitas keuangan, transparansi keuangan dan pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, adanya akuntabilitas keuangan, transparansi keuangan, dan pengawasan keuangan akan membuat kinerja pemerintah daerah menjadi baik.
6. Pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah melalui variabel pengawasan pengelolaan keuangan daerah mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah Provinsi Papua. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan adanya pengelolaan keuangan daerah maka akuntabilitas keuangan akan terlaksana dengan baik.
7. Pengaruh transparansi keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah melalui variabel pengawasan pengelolaan keuangan daerah mampu memperkuat kinerja pemerintah daerah Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berfungsi sebagai variabel intervening dalam penelitian ini.
8. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Papua. Adanya pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang efektif akan meningkatkan kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manap. 2016. *Revolusi Manajemen Pemasaran. Edisi Pertama*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Adi, Kurniawan Saputra I Komang. 2015. *Pengaruh Kompetensi, Koordinasi dan Kompleksitas Tugas Terhadap Kinerja Badan Pengawas Sebagai Internal Auditor di Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Agoes, Sukrisno, I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ananda Nicolla. 2019. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi kasus pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan)*. Tesis. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

- Auditya Lucy, Husaini dan Lismawati. 2013. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1 : 21- 42 (ISSN 2303- 0348).
- Coryanata, Isma. 2015. *Akutabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Jurnal SNA X.
- Dian Indira Murti. 2017. *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Serta Pengawasan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa*. Tesis, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uinalauddin, Makassar.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Semesta Rakyat Merdeka.
- Edison, Emron. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Alfabeta. Bandung.
- Fifit Purnama. 2019. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Padakabupaten Aceh Barat Daya*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 2, 01-15.
- Halim Abdul. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat.
- Handoko, T. Hani. 2014. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE, Yogyakarta.
- Ihyaul Ulum, 2017. *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi. Edisi ke-3*. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. 65144.
- Ika Indrayani. 2018. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Keuangan, Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Desa - Desa Se-Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*. Thesis. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Krina, Loina Lalolo. 2012. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Lasmin Mopangga. 2017. *Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo*. Tesis Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri gorontalo.
- Mahmudi. 2016. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Mardiasmo. 2012. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1 Mei.
- Muhadjir, Noeng. 2012. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Penny, Lukito Kusumastuti. 2014. *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 40 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Papua.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: PER – 1633 /K/JF/2011 Tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.
- Peraturan Pemerintah Pasal 4 No. 58 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pujiono, D. S., H. Sukarno, dan N. Puspitasari. 2016. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan, Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Povinsi Maluku Utara)*. Jurnal Bisnis dan Manajemen 10 (1) : 68-81.
- Rasul, Syahrudin. 2012. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Sekaran, Uma. 2013. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sembiring, Rosi Permata Sari. 2020. *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Medan*. Tesis. Universitas Medan.
- Setyanningrum, I. 2017. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money*. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Yogyakarta.
- Siregar, Baldric. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sopyan Badruzzaman. 2018. *Pengaruh Pengawasan Keuangan, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)*. Thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sukriah, Ika, Akram dan Biana Adha Inapty. 2009. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Obyektifitas, Integritas, dan Kompetensi Terhadap Kualitas Hasil Audit*. Simposium Nasional Akuntansi XII. Palembang.
- Tobi, Maria Regina. 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Studi Pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)*. Undergraduate Thesis, Stiesia Surabaya.
- Ulfah Juliarti. 2019. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variable Moderasi Pada Daerah Kabupaten Lahat (Studi Kasus Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kab.Lahat)*.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Wanda Fernandes. 2015. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar*. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Wiguna Budi Sastra Made. 2018. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*, e-Journal S1 Ak Universitas Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 3 No. 1 Tahun 2015).
- Wilson, Bangun. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Erlangga.
- Yohana Maria Viane Ina Laga. 2019. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur*. Tesis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.